

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

---

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 09
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 12 September 2017
Waktu	: Pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK-IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara	: Membahas RKA-K/L Tahun 2018 dan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi
Ketua Rapat	: Edhy Prabowo, MM., MBA.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo
Hadir	: A. 41 Anggota dari 50 Anggota Komisi IV DPR RI B. Hadir Pemerintah: 1. Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan); 2. Ir. Rifky Efendi Hardijanto (Sekretaris Jenderal); 3. Dr. Muhammad Yusuf, SH., MM. (Inspektur Jenderal); 4. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap) 5. DR.Ir. Slamet Soebjakto M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya); 6. Brahmantya Satyamurti Poerwadi, ST. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut); 7. Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan); dan 8. Dr.Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan) beserta jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas RKA-K/L Tahun 2018 dan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, dibuka pukul 15.00 WIB oleh Ketua Rapat Edhy Prabowo, MM., MBA. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas Pagu APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 sebesar Rp7.287.582.609.000,- yang bersumber dari:
  - a. Rupiah Murni sebesar Rp7.199.475.847.000,-;
  - b. PNBP sebesar Rp84.420.420.000,-; dan
  - c. HLN sebesar Rp3.686.342.000,-dengan komposisi program per-Eselon I sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp423.513.361.000,-;
  - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp73.117.458.000,-;
  - c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp1.264.959.688.000,-;
  - d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp944.857.746.000,-;
  - e. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp813.454.764.000,-;
  - f. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp785.003.713.000,-;
  - g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp666.921.318.000,-;
  - h. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.785.978.817.000,-; dan
  - i. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp529.775.744.000,-.Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas bersama Eselon I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp879,7 Miliar. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman untuk membahas kriteria teknis DAK dan alokasi perdaerah.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membicarakan kembali besaran APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terus menurun dari tahun 2016. Hal ini agar sebaran program dan anggaran menyentuh secara luas terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, serta mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia.
4. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas usulan APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 untuk kegiatan di Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMU-KP) sebesar Rp850.000.000.000,- (bersumber dari BA 999) dalam rangka untuk memudahkan akses permodalan kelompok usaha bidang kelautan dan perikanan.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat menerapkan rekomendasi hasil penelitian Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Perikanan dan Pergaraman.
6. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar merealokasi anggaran pada APBN Tahun 2018 untuk pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

7. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong peningkatan pendidikan bidang kelautan dan perikanan melalui pendirian sekolah tinggi perikanan, seperti meningkatkan status Sekolah Tinggi Penyuluhan Perikanan.
8. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dapat dikerjasamakan dengan PT. Garam (Persero) sehingga lebih produktif dan menjaga harga yang ekonomis, serta menjaga ketersediaan garam di tingkat masyarakat.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.15 WIB.

MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

**SUSI PUDJIASTUTI**

KOMISI IV DPR RI  
KETUA RAPAT,

Ttd.

**EDHY PRABOWO, MM., MBA.**  
A-335